



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FREDRICK DERMAWAN PURBA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET
3. NHK : 851396

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.196.420.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/90 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 951.420.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/115 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.625.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m²/86 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m²/39 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 510.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 205.000.000**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 110.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 6.021.420.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 2.401.465.283 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.619.954.717 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.